

# Ekspose Kemitraan dan Pemberdayaan Ekonomi: Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bekasi

Imam Haryadi\*

**Abstract.** *This research aim to understand the context of social welfare and community as understand democracy of economic and ideology that the prosperity of communities is primary, not the wealth of individuals and constitute the social rights of people. Appears a problem of agency self-supporting of community, poverty alleviation programs undertaken the agency self-supporting community (BKM) Bekasi. Data obtained by Interview (Indepth Interviews) and Focus Group Discussion to officials of agency self-supporting community in Bekasi covered 45 villages by consideration of agency self-supporting community as a potential in economic development and social welfare of the community, have a planned program, has a standard of unit financial management, having a partner who joined in the Self-Help Groups, organizational structure, legality of laws and completely administration. Data analysis was done by using descriptive statistics, which test primary data using descriptive statistics-qualitative. BKM as poverty alleviation programs and strategies to improve the social welfare of the people be able to increase optimalization the economic potential, braid of partnership and prosperity of empowerment and economic. BKM's program contained in the medium-term work program and annual programs and economic empowerment with BKM, where the strategy mentoring program BKM conducted in partnership with the Bank BRI, Social Worker of Community, PT. Unilever, PT. Hangson, PT. Priskon, Bank Mandiri, Yayasan Mitra Lestari, Social Security, Bank BTN, BPRS, RS. Rosana Medika. Strategies undertaken to further empower the community in improving the economic potential and prosperity by providing training, capital stimulant and activities that have a economic and social urgency to improve and further empower people toward prosperity.*

## Pendahuluan

Peningkatan kebutuhan sehari-hari serta sulitnya memenuhi kebutuhan masyarakat sudah lama

dialami dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, yang berakibat pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat diakibatkan oleh mahalnya kebutuhan pokok, bahkan ditambah oleh dicabutnya berbagai subsidi oleh pemerintah (konversi minyak tanah

---

\*Imam Haryadi, lahir di Bekasi, 20 Januari 1980. Sarjana S-1 (S.H.I) diperoleh di ISID (Institut Studi Islam Darussalam) Pondok Modern Darussalam Gontor, 2002. Gelar Magister (M.S.I) diperoleh pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Kini sebagai Dosen di UNISMA-Bekasi dan STAI Bani Saleh Bekasi.

ke gas, naiknya harga BBM, dsbnya), bahkan diperparah oleh meningkatnya serta mahalnya biaya pendidikan, pengobatan dan kesehatan bagi masyarakat.

Fenomena ini membuat berbagai permasalahan muncul di masyarakat serta tidak adanya kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam segala proyek yang dikurirkan melalui program bantuan IMF yang memiliki tujuan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Suasana politik yang kisruh serta tingginya tingkat korupsi menjadi momok dan isu penting dalam sistem pemerintahan, bahkan berbagai program sosial muncul dengan mengatasnamakan partai politik serta elite politik dan tokoh masyarakat bahkan ulama agama sebagai sebuah simbol menuju kekuasaan.

Kemunculan program jaring pengaman sosial, seperti kompensasi BBM, kesejahteraan masyarakat melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai), program penanggulangan kemiskinan melalui program IDT (Impres Desa Tertinggal), bantuan infrastruktur melalui PPPDT (Program Pembangunan Prasarana Desa Teringgal) dan program jalan poros desa (PPPJD) tidak mampu lagi untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Saat ini pemerintah menggalakkan program pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif, yaitu program-program pemberdayaan me-

lalui program pengembangan kecamatan (PPK), program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) dengan tujuan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi moneter yang berkepanjangan.

Program-program di atas memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui usaha bersama masyarakat, dengan melibatkan fungsi pemerintah dan pihak swasta secara mandiri dan berkelanjutan. Program ini memiliki fungsi untuk membantu masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi, agar mereka mampu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui program-program yang digalang oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).<sup>1</sup>

Adanya Berita Daerah Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2011 Kota Bekasi terkait petunjuk teknis dana bantuan hibah stimulan pembangunan infrastruktur melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), merupakan program pemerintah Kota Bekasi dalam rangka mendukung peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan untuk

---

<sup>1</sup>Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang diselanjutnya disebut BKM/LKM adalah Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Berita Acara Pembentukan BKM/LKM di wilayah kelurahan yang dilegalakan oleh Notaris.

mempercepat proses pembangunan melalui penggalan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Konteks kesejahteraan sosial atau masyarakat adalah berdasarkan paham demokrasi ekonomi dan tuntutan ideologi bahwa kemakmuran masyarakatlah yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang serta merupakan hak sosial rakyat.<sup>3</sup> Dengan demikian, sesungguhnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah tujuan derivatif untuk mendukung sasaran pokok, yaitu target ekonomi-sosial dan kemanusiaan untuk memberantas kemiskinan dan pengangguran demi kesejahteraan sosial masyarakat.

Pertumbuhan ini tidak perlu menunggu sempat tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan pesatnya maju ekonomi, akan tetapi investasi ekonomi haruslah dilakukan secara stra-

---

<sup>2</sup> Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Di Kelurahan Se-Kota Bekasi Tahun 2011, Bab II, Pasal 2 dan 3.

<sup>3</sup> Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*, (Jakarta: Penerbit Perkumpulan PraKarsa, 2010), 1-2.

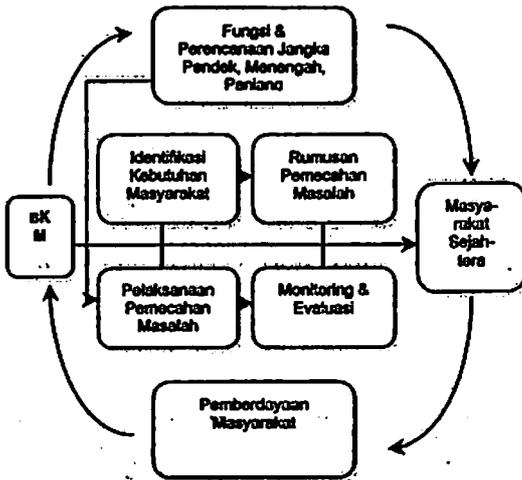
tegis dan efektif yang membawa kepada dampak kemakmuran dan kesejahteraan. Serta pemetaan investasi sosial harus mampu meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat, terintegrasi dan mencapai sasaran dalam perencanaan pembangunan nasional.

Dengan demikian, untuk melaksanakan implementasi terhadap Pasal 33 UUD 1945, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dana yang disalurkan melalui program hibah stimulan kepada masyarakat Kota Bekasi yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Komitmen terhadap implementasi dan doktrin UUD 1945 membuktikan bahwa program hibah stimulan ini dapat menyumbangkan serta berkontribusi terhadap ekonomi nasional Indonesia.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian dalam survey program ini adalah Bagaimana fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Se-Kelurahan Kota Bekasi?, Bagaimana program-program dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Se-Kelurahan Kota Bekasi?, serta Bagaimana strategi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilakukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Se-Kelurahan Kota Bekasi?.

### Kerangka Teori

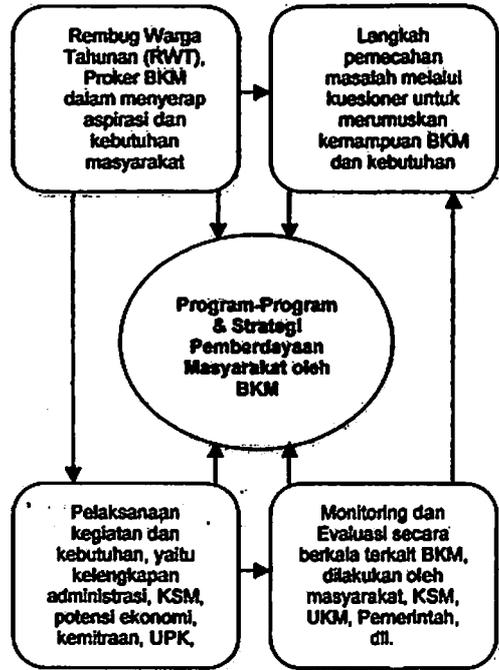
Untuk mempermudah dalam melakukan survey serta upaya untuk mempermudah kerangka kerja penelitian, maka kerangka pelaksanaan program secara sederhana disusun berdasarkan kerangka analisis pemikiran sebagai berikut:



Gambar : 1

Kerangka pikir fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Se-Kelurahan Kota Bekasi

Adapun kerangka pikir program dan strategi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Se-Kelurahan Kota Bekasi tertuang dalam gambar di berikut ini :



Gambar : 2

Kerangka pikir program dan strategi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Se-Kelurahan Kota Bekasi

## Metode Penelitian

### A. Pengumpulan Data

Data diperoleh dari berbagai sumber, adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui tehnik wawancara (*indepth interview*) dengan kuesioner, *Focus Group Discussion* (FGD) kepada para pengurus Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) di seluruh Kelurahan Kota Bekasi Jawa Barat. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai instansi teknis, perbankan, BPS, Pemerintah Daerah (PEMDA), dan lembaga lain dalam rangka identifikasi potensi dari sisi kegiatan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial dan masyarakat.

### B. Pengambilan Populasi dan Sampel

Wilayah dalam penelitian ini adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kota Bekasi, yang tersebar di 12 Kecamatan mencakup 56 kelurahan, sehingga jumlah populasi penelitian adalah sebanyak 56 BKM. Pengambilan populasi penelitian berdasarkan pertimbangan terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai potensi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, memiliki program kegiatan yang terencana, memiliki standar unit pengelola keuangan (UPK), memiliki mitra yang tergabung dalam Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM), memiliki struktur organisasi dan legalitas hukum yang sah, dan adanya kelengkapan administrasi.

Jumlah responden sebagai sampel penelitian yang diperoleh adalah 45 BKM, dari total populasi sebanyak 56 BKM yang tersebar di seluruh kelurahan Kota Bekasi. Pengambilan responden dilakukan dengan mela-

kukan penyebaran kuesioner langsung kepada para struktur BKM dengan mendatangi langsung ke setiap lokasi BKM.

### C. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif statistik, dimana pengujian data primer dengan menggunakan *statistika deskriptif-kualitatif* yaitu metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna.<sup>4</sup> Statistika deskriptif hanya memberikan informasi data yang diperoleh dan tidak menarik kesimpulan.

### Gambaran Umum dan Karakteristik BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan suatu institusi/ lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban, dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif di tingkat Desa/Kelurahan, yang bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang kondusif. Untuk pengembangan keswadayaan masyarakat

---

<sup>4</sup>Ronald E. Walpole, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 2-5. Lihat juga, Dergibson Siagian dan Sugiarto, *Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 4-6.

kat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya, BKM juga menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga bersama, memecahkan persoalan bersama dan menyatakan kepedulian bersama yang berkaitan dengan kemiskinan.

Tujuan BKM sendiri adalah membangun modal sosial (*social capital*) dengan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan serta menggalang solidaritas untuk bekerjasama demi kebaikan, kepentingan, kebutuhan bersama dalam memperkuat keswadayaan masyarakat. Adapun tugas BKM/LKM adalah:

a. Merumuskan kehijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.

b. Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan Pronangkis.

c. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil.

d. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan monitoring evaluasi.

e. Memonitor, memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal.

f. Membangun transparansi dan akuntabilitas.

g. Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan dan kegiatan UP-UP, termasuk penggunaan keuangan.

h. Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan dan Pemkot/Kab dan pihak-pihak lain.

Sementara fungsi BKM/LKM, yaitu Penggerak dan penumbuh-kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan, Pengembangan aturan dan kode etik, Pengambil keputusan dan kebijakan yang adil, jujur, transparan, akuntabel dan demokratis untuk urusan penanggulangan kemiskinan, Tempat mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat, Pusat informasi dan komunikasi bagi masyarakat kelurahan untuk penanggulangan kemiskinan, Advokasi Integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan pemerintah setempat.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kota Bekasi terdapat di seluruh wilayah kecamatan Kota

Bekasi. Adapun ikhtisar BKM di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel : 1  
Sebaran BKM di Masing-Masing Kelurahan Kota Bekasi

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah BKM
1	Bekasi Timur	Empat Kelurahan, yaitu Aren Jaya, Duren Jaya, Bekasi Jaya, Margahayu.	Empat BKM
2	Mustika Jaya	Empat Kelurahan yaitu Cimuning, Mustika Jaya, Mustika Sari, Pedurenan.	Empat BKM
3	Bekasi Utara	Enam Kelurahan, yaitu Teluk Pucung, Marga Mulya, Kaliabang Tengah, Perwira, Harapan Jaya dan Harapan Baru	Enam BKM
4	Medan Satria	Empat Kelurahan, yaitu Harapan Mulya, Kali Baru, Satria, Pejuang	Empat BKM

5	Bekasi Barat	Lima Kelurahan, yaitu Jaka Sampurna, Bintara, Kota Baru, Kranji, Bintara Jaya	Lima BKM
6	Jati Asih	Enam Kelurahan, yaitu Jati Asih, Jati Kramat, Jati Mékar, Jati Rasa, Jati Sari dan Jati Luhur.	Enam BKM
7	Rawalumbu	Empat Kelurahan, yaitu Sepanjang Jaya, Bojong Menteng, Pengasinan, Bojong Rawalumbu.	Empat BKM
8	Bantar Gebang	Empat Kelurahan, yaitu Sumur Batu, Ciketing Udik, Bantar dan Cikiwul	Empat BKM
9	Bekasi Selatan	Lima Kelurahan, yaitu Jaka Mulya, Kayuringin, Pekayon, Jaka Setia dan Marga Jaya.	Lima BKM
10	Pondok Gede	Lima Kelurahan, yaitu Jati Bening, Jati Cempaka, Jati Makmur,	Lima BKM

		Jati Waringin dan Jatibening Baru.	
11	Jati Sampurna	Lima Kelurahan, yaitu Jati Karya, Jati Raden, Jati Rangga, Jati Ranggon dan Jati Sampurna	Lima BKM
12	Pondok Melati	Empat Kelurahan, yaitu Jati Melati, Jati Warna, Jati Murni dan Jati Rahayu.	Empat BKM
	Jumlah BKM		56 BKM

Sumber: data diolah 2012

Secara keseluruhan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tersebar di tiap-tiap kelurahan di Kota Bekasi. Dengan demikian, jumlah keseluruhan BKM adalah sebanyak 56 BKM. Survey dilakukan terhadap 43 BKM dari total 56 BKM yang menjadi populasi penelitian, dimana 13 BKM surveyor tidak dapat menemui pengurus BKM, dikarenakan pengurus sedang tidak berada di kantor sekretariat BKM. Hasil survey terhadap 43 BKM terkait struktur BKM sebagai berikut:

Tabel : 2  
Struktur Pimpinan BKM Kota Bekasi

No	Nama BKM	Jumlah Pimpinan Kolektif
1	Arya	9 orang
2	LKM Duren Jaya	11 orang
3	Jaya Makmur	9 orang
4	Margahayu	11 orang
5	Mekar Jaya	9 orang
6	Paguyuban Warga Mustika Jaya	9 orang
7	Mustika Sari	9 orang
8	Anggrek	11 orang
9	Kaliabang Sejahtera	11 orang
10	Perwira	9 orang
11	Paguyuban Warga Kelurahan Harja	11 orang
12	Maju Mandiri	9 orang
13	Harapan Mulya	11 orang
14	Mitra Pejuang	9 orang
15	Mandiri	9 orang
16	Pembaruan	9 orang
17	Kota Baru	13 orang
18	Candrabaga	9 orang
19	Bintara Jaya	9 orang
20	Sejahtera	9 orang
21	Lembaga Bina Mandiri	13 orang
22	Mekar Manunggal	9 orang
23	Rasa Asih	9 orang
24	Bakti Mandiri	9 orang
25	Jati Luhur Barokah	9 orang
26	Berkah Jaya	9 orang
27	Bojong Menteng	9 orang
28	Dana Abadi	9 orang
29	Maju Bersama	9 orang
30	Amanah	9 orang
31	Amaliah Jaya	13 orang
32	Bina Mandiri	9 orang
33	Jatibening	11 orang
34	LKM Cempaka Mandiri	9 orang
35	LKM Jati Makmur Mandiri	13 orang

36	Paguyuban Warga Kelurahan Jati Waringin	9 orang
37	LKM Sejahtera Jati Bening Baru	11 orang
38	Paguyuban Warga Kelurahan Jati Karya	9 orang
39	Raden Kencana	11 orang
40	Sejahtera Jati Ranggon	9 orang
41	Jati Melati Laju Berkembang	9 orang
42	Murni Mandiri	9 orang
43	Jati Rahayu	9 orang

Sumber: data diolah 2012

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh BKM yang ditetapkan melalui Rembug Warga Tahunan (RWT) mencakup kegiatan untuk program jangka menengah, kegiatan yang bersifat program tahunan, yang dilakukan oleh mitra BKM dengan melihat potensi ekonomi daerah atau lokal. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan program jangka menengah yaitu:

1. Pembinaan UMKM berkerjasama dengan Bank dan Lembaga Keuangan lain, pembinaan koperasi aktif, dan pembinaan KSM dan usaha kecil.
2. Pembangunan sarana MCK, pelatihan menjahit dan bordir serta kredit ekonomi bergulir.
3. Pembiayaan modal kepada UKM.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industri dan budidaya tanaman.
5. Pembinaan bank sampah.

6. Kegiatan posyandu dan perbaikan jalan.

7. Program penanggulangan kemiskinan (PRONANGKIS).

8. Kegiatan simpan pinjam, program sosial dan lingkungan.

Sementara kegiatan-kegiatan yang bersifat program tahunan yang dilakukan yaitu:

1. Pembinaan UKM, pembangunan koperasi pengembangan ekonomi lokal (KOPEL), dan KSM.

2. Kegiatan Bazar dan simpan pinjam (simpanan ekonomi bergulir).

3. Channeling, pelatihan sosial ekonomi, penyuluhan HIV dan narkoba.

4. Pemberian pinjaman (modal) lunak dan perbaikan infrastruktur.

5. Santunan yatim, pembangunan rumah tidak layak huni (RUTILAHU), budidaya jamur, lele dan peternakan.

Secara keseluruhan, masing-masing BKM memiliki potensi ekonomi yaitu kerajinan tangan dan industri, perdagangan, peternakan, pertanian, *handicraft*, *home industri*, UKM, pengelolaan limbah sampah dan industri, pemancingan, kuliner, *digital printing*, meubel, asesoris, bengkel, warung mikro, souvenir, warnet. Potensi ini dikembangkan dengan melihat sumber daya dan kearifan lokal yang mengacu pada program jangka menengah dan tahunan yang telah di bahas oleh Rembug Warga Tahunan (RWT).

Dalam setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing BKM, BKM melakukan kemitraan antara lain kepada Bank BRI, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), PT. Unilever, PT. Hangson, PT. Priskon, Bank Mandiri, Yayasan Mitra Lestari, Jamsostek, Bank BTN, BPR, RS. Rosana Medika. Adapun penilaian pemerintah Kota Bekasi terhadap kinerja BKM dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel : 3  
Kategori Penilaian BKM

No.	Kategori Penilaian Pemerintah Pada BKM	Jumlah	Prosentase
1	Sangat Baik	9 BKM	20,9 %
2	Baik	27 BKM	62,8 %
3	Cukup Baik	7 BKM	16,3 %
	Jumlah	43 BKM	100 %

Sumber: data diolah 2012

Hasil tabel di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan penilaian pemerintah Kota Bekasi terhadap kinerja BKM adalah baik, dengan tingkat prosentase mencapai 62,8 %, sangat baik dengan prosentase sebesar 20,9 % dan cukup baik (16,3 %). Adapun potensi program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi BKM Kota Bekasi, dari hasil survey menjelaskan beberapa kendala program di BKM antara lain: (a) Kurangnya partisipasi masyarakat serta belum maksimalnya partisipasi pemerintah atau peran stakeholders. (b). Minimnya biaya operasional BKM

serta kurangnya relawan dalam setiap kegiatan BKM. (c) Kurangnya semangat gotong royong dan minimnya kehadiran RT/RW serta pimpinan kolektif dalam musyawarah BKM. (c) Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi BKM dan keterbatasan SDM BKM. (d) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk swadaya dan membayar kewajiban pengembalian pinjaman. (e) Sulitnya komunikasi dan permodalan di BKM. (f) Kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas kantor dan administrasi BKM. (g) Perputaran keuangan BKM yang tidak lancar, hal ini disebabkan antara lain karena pengembalian pinjaman modal macet serta keterbatasan anggaran dan modal.

Hampir secara menyeluruh yaitu sekitar 41 BKM, para pimpinan kolektif bermitra dan mendapatkan pengawasan anggaran yang telah diterima. Hanya dua BKM yaitu BKM Jati Melati Laju Berkembang dan BKM Murni Mandiri yang tidak bermitra dan memperoleh pengawasan anggaran yang diterima.

Adapun kelengkapan administrasi, BKM melakukan kelengkapan administrasi sesuai dengan kebutuhan BKM, tertib administrasi dan pembukuan keuangan, pencatatan, pembuatan notulen juga dilakukan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan administrasi yang baik dan tertib, serta

membuat rencana dan pelaporan yang terukur berdasarkan bukti pengeluaran dan pemasukan, dengan bekerjasama dengan pimpinan kolektif.

Standar pelaporan dan pembukuan setara dengan model pelaporan perbankan setiap bulan dan dilengkapi dengan BOP sekretariat. Input data dilakukan sesuai tepat waktu dan membuat pencatatan sesuai tugas masing-masing serta dilakukan pengarsipan, dan ada LPJ, proposal serta audit tahunan. Laporan keuangan dibuat dan disusun oleh UPK setiap akhir bulan dengan tertib dan berdasarkan adanya penyaluran dana. Sehingga seluruh BKM melakukan pelaporan keuangan secara periodik secara tertib.

#### **B. Preferensi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap BKM Dalam Pemberdayaan Ekonomi**

Pembentukan KSM ekonomi dilakukan dengan cara pengajuan proposal pinjaman bergulir dengan anggota minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Beberapa BKM ada yang belum melakukan pembentukan KSM ekonomi, ada juga yang sedang dibentuk KSM ekonomi. Ada juga yang melakukan pembentukan KSM ekonomi dengan jalan musyawarah, pembentukan dilakukan menurut wilayah dan jenis usaha. Secara eksplisit, pembentukan juga dapat dilakukan dengan rapat warga secara

musyawarah yang dipimpin oleh BKM dan UPK.

Pembentukan KSM ekonomi dilakukan untuk tujuan menambah kesejahteraan masyarakat, dimana proses pembentukan biasanya melalui rembuk warga dengan melakukan survey skala kecil oleh KSM dengan tujuan untuk mempermudah pengembalian pinjaman. Kemudian dilakukan dan dibentuk beberapa pengusaha kecil, dikelompokkan sesuai jenis usaha dan wilayah. Beberapa BKM memberikan bantuan kepada KSM sebanyak 4 kali maksimal pinjaman, ada juga yang tergantung dengan kebutuhan KSM, hal ini disebabkan oleh banyaknya KSM dalam setiap BKM yang mencapai 34 KSM. Ada juga KSM yang belum pernah memperoleh bantuan, ada yang 3 kali, sekali, 2 kali setiap tahunnya.

Beberapa KSM yang memperoleh bantuan sebanyak 9 kali dalam tiga tahun terakhir, ada yang telah mendapat 5 kali, ada yang 12 kali, bahkan berulang kali. Akan tetapi mayoritas BKM memberikan bantuan 1 kali kepada KSM setiap tahunnya. Sampai sejauh ini, preferensi atau penilaian KSM terhadap BKM sangat baik, karena KSM sangat terbantu dengan adanya program ini. Program ini juga mampu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, serta bukti transparansi dan kepedulian pemerin-

tah terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat menilai kebijakan pemerintah sangat bagus, karena membantu masyarakat dalam penambahan modal, perbaikan jalan, sarana posyandu, rumah tidak layak huni, sehingga secara keseluruhan sangat baik untuk pembangunan masyarakat. Maka realisasi pembangunan juga dilakukan dengan perbaikan renovasi dan realisasi jalan yang rusak, serta membantu dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, kekompakan antara Pimpinan Kolektif dan Sekretaris BKM sangat bagus. Keduanya saling membantu dan saling bekerjasama dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kekompakan tersebut juga terjalin dalam hubungan komunikasi organisasi, sehingga berdampak pada hubungan yang harmonis dan masing-masing sangat menghargai perbedaan pendapat.

#### Penutup

Berdasarkan hasil survey terhadap fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Se-Kelurahan Kota Bekasi, program-program dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Se-Kelurahan Kota Bekasi, serta strategi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilakukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Se-Kelurahan Kota

Bekasi. Diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Sampai saat ini, fungsi BKM di Kelurahan Kota Bekasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik, dimana BKM melakukan rebug warga tahunan (RWT), memiliki program kerja jangka menengah, program tahunan, adanya unit pengelola keuangan (UPK), meningkatkan optimalisasi potensi ekonomi di lingkungan BKM, menjalin kemitraan dalam pemberdayaan kesejahteraan dan ekonomi.

- Secara umum, beberapa program-program BKM telah dilakukan seperti yang tertuang dalam program kerja jangka menengah dan program tahunan, serta pemberdayaan ekonomi bersama mitra BKM, antara lain program pembinaan UMKM, koperasi aktif, *home industry* dan pembinaan KSM. Pembangunan dan renovasi fasilitas dan sarana MCK, pengelolaan sampah, pos yandu, perbaikan jalan, pelatihan (menjahit dan bordir), budidaya jamur, lele dan peternakan, serta kredit ekonomi bergulir. Program penanggulangan kemiskinan (PRONANGKIS), *channeling*, pelatihan sosial ekonomi, penyuluhan kesehatan (HIV dan narkoba), serta program sosial santunan yatim, pembangunan rumah tidak layak huni (RUTILAHU).

- Adapun strategi yang dilakukan dalam pendampingan program-program BKM, yaitu dengan mela-

kukan kemitraan antara lain Bank BRI, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), PT. Unilever, PT. Hangson, PT. Priskon, Bank Mandiri, Yayasan Mitra Lestari, Jamsostek, Bank BTN, BPR, RS. Rosana Medika. Selain itu, strategi dilakukan untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan dengan memberikan pelatihan, stimulan modal usaha, serta kegiatan-kegiatan yang memiliki urgensi ekonomi dan sosial yang dapat meningkatkan serta lebih memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan.

Dari hasil survey ini, diperoleh beberapa saran dan rekomendasi antara lain, yaitu:

- Untuk lebih meningkatkan eksistensi dan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), diperlukan peningkatan SDM BKM untuk lebih melancarkan segala kegiatan dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk lebih tepat guna dan efisien.

- Perlu ditinjau kembali bagi para organisatoris BKM, bahwasannya ruang lingkup pekerjaan pada BKM merupakan pekerjaan seseorang sebagai relawan, sehingga tidak memperoleh imbalan, akan tetapi kepercayaan yang diberikan sepenuhnya oleh masyarakat kepada BKM perlu dijunjung tinggi sebagai amanah dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang mengikat demi pem-

berdayaan masyarakat sejahtera dan pembangunan nasional.

#### Daftar Pustaka

- Creswell, John. W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Oleh Achmad Fawaid, Cetakan Pertama, Edisi Ketiga, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Rajawali Press, 1999.
- Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003.
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Hibah Stimulan Pembangunan Infrastruktur Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Di Kelurahan Se-Kota Bekasi Tahun 2011.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta, Gaya Media, 2004.
- Swasono, Sri Edi, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*, Jakarta, Penerbit Perkumpulan PraKarsa, 2010.
- Walpole, Ronald E., *Pengantar Statistika*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

